

LAPORAN PPID 2020



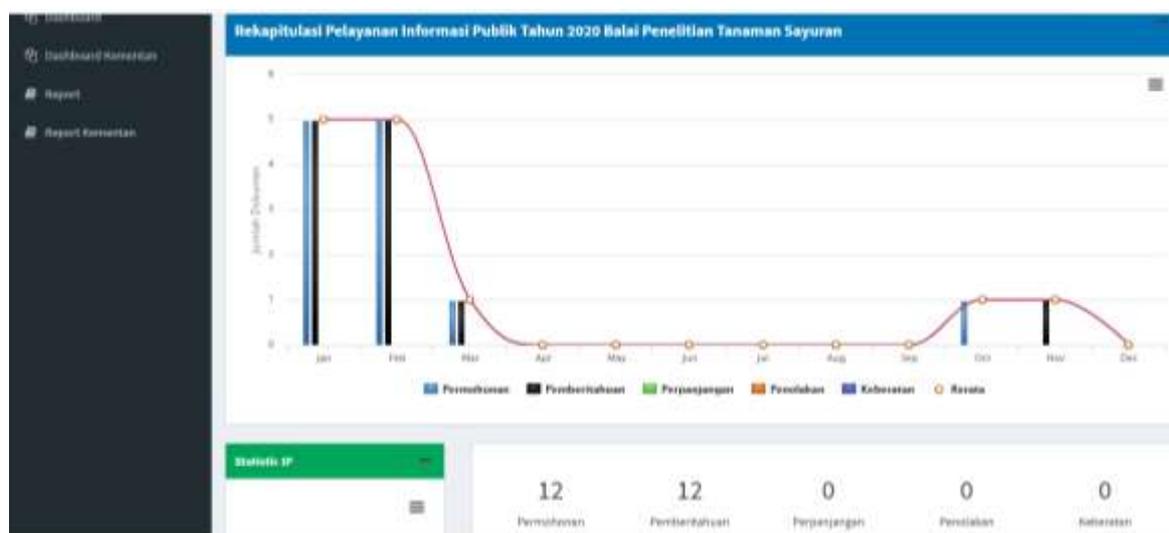
BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN

Jl. Tangkuban Perahu No.517 Lembang
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat



REKAPITULASI PERMOHONAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2020, Balai Penelitian Tanaman Sayuran Pimpinan selaku pelaksana layanan tersebut telah melakukan rekapitulasi permohonan informasi publik, pemohon informasi publik melalui aplikasi SiLayan sebanyak 12 pemohon dan pemohon informasi secara langsung sebanyak 802 pemohon.



Gambar. Grafik pemohon informasi publik melalui aplikasi SiLayan

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permohonan yang diterima	Jumlah permohonan yang ditolak
Januari	205	1	205	0
Februari	154	3	154	0
Maret	55	2	55	0
April	18	2	18	0
Mei	15	2	15	0
Juni	13	1	13	0
Juli	30	1	30	0
Agustus	15	2	15	0
September	35	1	35	0
Oktober	38	2	38	0
November	49	1	49	0
Desember	175	1	175	0
Total	802		802	0

Gambar. Rekapitulasi Permohonan secara langsung (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)

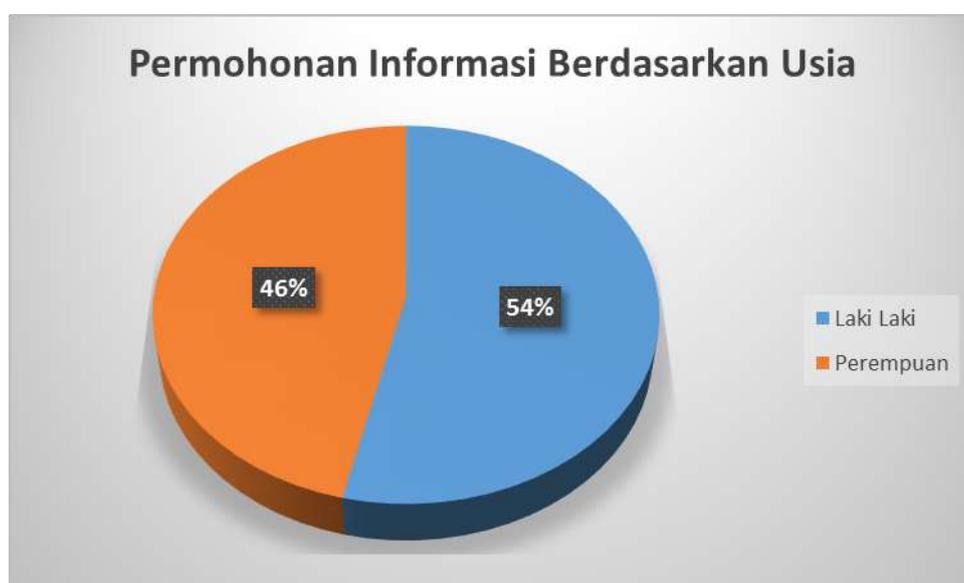
REKAPITULASAI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Balitsa. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Sehingga, pada tahun 2020 PPID Balitsa tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Balitsa, maka secara otomatis pada tahun 2020 PPID Balitsa tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

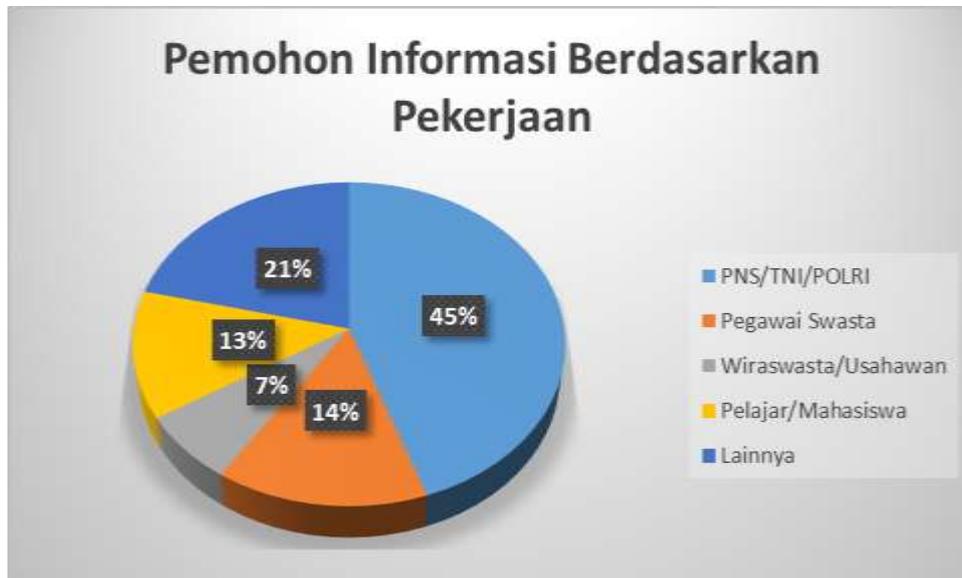
Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi untuk kategori individu, permohonan informasi yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 423 orang dan perempuan sebanyak 365 orang.



Gambar. Permohonan Informasi Berdasarkan Usia

JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

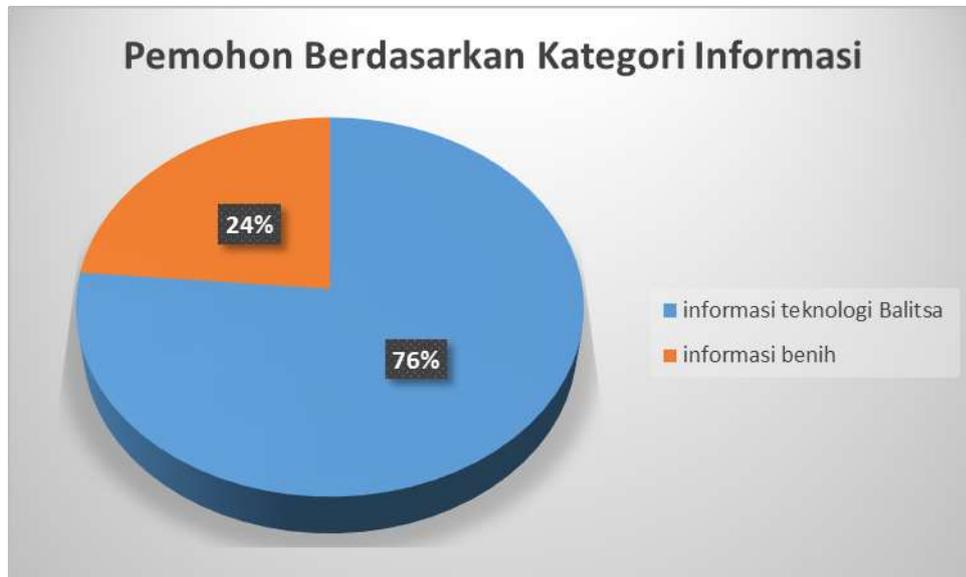
Berdasarkan jenis pekerjaan, permohonan informasi individu didominasi oleh PNS sebanyak 356 orang, pegawai swasta sebanyak 116 orang, wiraswasta sebanyak 55 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 101 orang dan lainnya sebanyak 169 orang.



Gambar. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

Berdasarkan jenis informasi yang diminta, informasi yang dibutuhkan publik adalah berkaitan dengan kegiatan dan kinerja badan publik, informasi teknologi Balitsa sebanyak 602 dan informasi benih 186.



Gambar. Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan

MOTTO DAN MAKLUMAT PPID

Motto



Maklumat Pelayan PPID



SEKILAS PPID BALITSA

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara lainnya yang sebagian

atau seluruh dananya mendapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Apabila hal itu dilakukan, maka akan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai langkah awal, Badan Publik yang ada di Balai Penelitian Tanaman Sayuran harus segera menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 yaitu untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Penunjukan PPID dilakukan oleh pimpinan Badan Publik diikuti dengan pembentukan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik tersebut. Dengan terbentuknya PPID di Balitsa kewajiban Badan Publik dapat dijalankan dan hak pemohon informasi publik dapat terpenuhi. Adanya permintaan informasi publik disetiap tingkatan pemerintahan akan dapat dipenuhi sehingga dapat memperkecil terjadinya sengketa informasi.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengumpulan dan pendokumentasian informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja; Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi; Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;

Selama tahun 2020 pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2020 telah dikumpulkan dan dapat diakses melalui situs web PPID Balai Penelitian Tanaman

Sayuran <http://balitsa.litbang.PPID.pertanian.go.id> dan Website <http://balitsa.litbang.pertanian.go.id>

dan Website



Gambar. Tampilan Website PPID Balai Penelitian Tanaman Sayuran



Gambar. Tampilan Website Balai Penelitian Tanaman Sayuran

Beberapa informasi dan dokumentasi yang dicantumkan meliputi :

Informasi dan dokumentasi yang dihimpun dan dikelola oleh Balitsa senantiasa mengacu pada peraturan yang ada. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori informasi, yaitu:

1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak, Struktur Organisasi, Profil singkat pejabat

struktural, Tugas dan fungsi, LHKPN, Laporan Kinerja (LAKIN), Laporan Tahunan, Rencana Strategis, Rencana Kerja.

2. Informasi yang wajib tersedia serta merta ; Peringatan dan evakuasi, protokol kesehatan pandemi covid, Prosedur Keadaan Darurat.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; peraturan perundangan, Profil lengkap pimpinan dan pegawai, DIPA RKA-K/L, Laporan Keuangan, Infografis, Statistik Kepegawaian, Statistik Keuangan, Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga (nota kesepahaman).

Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Profil
 - Alamat lengkap
 - Visi dan Misi
 - Tugas Pokok dan Fungsi
 - Struktur Organisasi
- b. Layanan Informasi Publik
 - Standar Layanan
 - Layanan Kunjungan
 - Perpustakaan
 - Laboratorium
 - UPBS
- c. Profil Pejabat
 - Kepala Balai
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Kordinator Jasa Penelitian
 - Sub Kordinator Pelayanan Teknik
- d. LHKPN
 - LHKPN Sub Bagian Tata Usaha
 - LHKPN PPK Penelitian
 - Bendahara Penerima
 - Pejabat Pengadaan
- e. Laporan Tahunan 2015-2019
- f. LAKIN (2016-2019)
- g. Rencana Anggaran
 - DIPA tahun 2014-2020
 - RKAKL 2019-2020
- h. Laporan Keuangan
 - Neraca Keuangan 2016-2018

- Laporan Arus Kas 2016-2018
- Laporan Keuangan 2016-2019
- i. Daftar Aset Unit Kerja
- j. Daftar Informasi Publik
 - Info Pengadaan Barang dan Jasa
 - Jasa Penelitian
 - UPBS Ketersediaan Benih
 - Laboratorium Penguji
- k. Surat – Surat Perjanjian (Nota Kesepahaman)
- l. Rencana Kinerja
 - Rencana Kinerja Tahunan
 - Renstra 2015-2019
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP)



Gambar. Daftar Informasi Publik yang telah diupdate di Portal PPID Balai Penelitian Tanaman Sayuran

Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Balai Penelitian Tanaman Sayuran menyediakan desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan tidak langsung oleh petugas layanan, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kesesuaian persyaratan pelayanan yaitu berupa :

Layanan Langsung

- a. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi meja (2 unit), kursi (10 unit), telepon (1 unit), perangkat komputer (1 unit), dan kotak saran (kepuasan pelanggan).



b. Tersedianya area dan sarana akses internet

1.1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna meningkatkan kredibilitas dan transparansi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Penelitian Tanaman Sayuran.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu di susun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam setahun 2 kali (per semester). Rekap data SKM dari 3 unit pelayanan Balitsa. Pada semester I (Januari – Mei) terdapat 318 responden dan pada semester II (Juni – Desember) terdapat 464 responden, berikut hasil perhitungan SKM tahun 2020 :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%	No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3.42	85.61	U1	Persyaratan	3.58	89.49
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.49	87.19	U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.65	91.27
U3	Waktu Penyelesaian	3.42	85.38	U3	Waktu Penyelesaian	3.50	87.61
U4	Biaya/Tarif	3.21	80.35	U4	Biaya/Tarif	3.38	84.59
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.34	83.49	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.52	88.09
U6	Kompetensi Pelaksana	3.47	86.87	U6	Kompetensi Pelaksana	3.60	89.92
U7	Perilaku Pelaksana	3.62	90.41	U7	Perilaku Pelaksana	3.70	92.56
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.56	88.92	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.83	95.80
U9	Sarana dan Prasarana	3.48	87.11	U9	Sarana dan Prasarana	3.49	87.23
NRR Tertimbang Unsur		3.45		NRR Tertimbang Unsur		3.58	89.62

Gambar. Nilai SKM Semester 1

Gambar. Nilai SKM Semester 2

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pengelola informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Sayuran melekat pada Bidang Jasa Penelitian sesuai Keputusan Kepala Balai Nomor 12/Kpts/OT.50/H.3.1/01/2020.

Anggaran PPID

Pendanaan kegiatan Humas dan Protokoler Tahun 2020, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Balai Penelitian Tanaman Sayuran Tahun Anggaran 2020, Manajemen Pelayanan Publik Litbang Tanaman Sayuran dengan total anggaran Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

PENUTUP

- Secara umum pelayanan informasi di lingkungan Balitsa dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2020.
- Kesadaran akan pentingnya kegiatan layanan informasi di unit kerja semakin meningkat ditunjukkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di setiap unit kerja.